



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

DIREKTORAT JENDERAL  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

---

# **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2021**

Pengarah:

**Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik**

---

Penanggung Jawab:

**Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik**

---

Penulis:

**Prasetyo Hadi**

**Dewi Yuliana Lestari**

**Sri Handiman Supyansuri**

---

Pengolah Data:

**Nurjiyanto**

**Marina**

**Eni Eryani**

---

Diterbitkan oleh:

**Bagian Perencanaan Program & Pelaporan**

**Setditjen Informasi dan Komunikasi Publik**

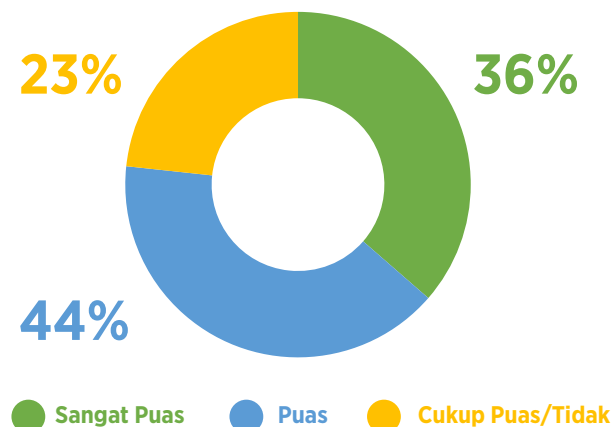
**Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

**Tahun 2022**

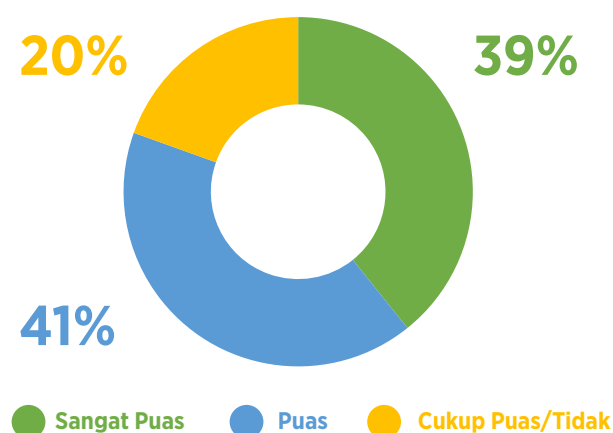
# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2021 menyajikan berbagai upaya dan hasilnya sepanjang tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran program. Target kinerja yang ditetapkan secara umum telah dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai.

## Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi yang Didapatkan (rata-rata 76%)



## Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi yang Didapatkan (rata-rata 80%)



Pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 pada aspek peningkatan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah sebagai turunan utama.

Laporan kinerja juga menggambarkan terhadap kontribusi pada Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 pada aspek Peningkatan Kualitas Tata Kelola terkait dengan Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja, dan Kinerja Anggaran. Secara keseluruhan, keberhasilan program-program tersebut sangat ditentukan oleh komitmen serta peran aktif dari segenap komponen sivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik serta lembaga-lembaga terkait. Uraian perihal capaian dari sasaran program secara detail digambarkan pada Bab III.

# KATA PENGANTAR



Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

LAKIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas instansi pemerintahan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN periode satu tahun berjalan.

Penyusunan LAKIP bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran. Di lingkup Ditjen IKP, LAKIP disusun berdasarkan sasaran kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Di tengah pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, segenap jajaran Ditjen IKP senantiasa berkomitmen dan berupaya keras melakukan beragam inovasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diturunkan dari agenda pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Dengan demikian, kegiatan di lingkup Ditjen IKP kedepannya diharapkan semakin banyak yang terukur dan lebih tajam outcome-nya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Kehadiran LAKIP Ditjen IKP ini pada akhirnya diharapkan dapat mewakili penilaian kinerja Ditjen IKP Tahun 2021 dan dimanfaatkan sebagai media untuk mengevaluasinya. Kami ucapkan terima kasih atas peran serta dan kerja keras seluruh pimpinan dan jajaran Ditjen IKP yang telah memungkinkan terlaksananya fungsi dan tugas yang diemban selama tahun 2021.

Jakarta, Maret 2022

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Usman Kansong

# DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Struktur Organisasi .....	3
B. Kedudukan dan Fungsi .....	4
C. Sumber Daya Manusia .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS .....</b>	<b>14</b>
A. Capaian Unit Kerja Eselon I .....	14
A. 1 Sasaran Program Ditjen IKP .....	14
A. 2 Pengukuran Kinerja .....	16
B. Capaian Unit Kerja Eselon II .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Rekomendasi .....	58
<b>REFERENSI .....</b>	<b>59</b>
Lampiran Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	60

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	SDM berdasarkan Jabatan di Lingkup Ditjen IKP .....	5
Tabel 2	SDM berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP.....	6
Tabel 3	Indikator Pencapaian Sasaran Strategis IX .....	9
Tabel 4	Volume Kegiatan Sosialisasi Ditjen IKP 2021 .....	11
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Tahun Anggaran 2021 .....	15
Tabel 6	Perbandingan Capaian Kinerja Komunikasi Publik 3 (tiga) tahun terakhir .....	16
Tabel 7	Capaian Kinerja Eselon I Ditjen IKP .....	17
Tabel 8	Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional 2021 .....	23
Tabel 9	Survei PCPEN .....	24
Tabel 10	Variabel dalam Penguatan Komunikasi Publik .....	25
Tabel 11	Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah Sektor .....	26
Tabel 12	Diseminasi PCPEN .....	29
Tabel 13	Diseminasi PON PEPARNAS .....	30
Tabel 14	Aktivitas Diseminasi KTT G-20 .....	32
Tabel 15	Konter Berita Hoaks .....	33
Tabel 16	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2020 .....	43
Tabel 17	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Polhukam Tahun 2021 .....	44
Tabel 18	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Perekonomian dan Maritim Tahun 2021 .....	46
Tabel 19	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK PMK Tahun 2021 .....	48
Tabel 20	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2021 .....	50
Tabel 21	Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen IKP Tahun 2021 .....	51
Tabel 22	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Komponen Pengungkit (Pemenuhan) 2020 .....	52
Tabel 23	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Komponen Pengungkit (Reform) 2021 .....	52
Tabel 24	Matriks Penilaian SPIP oleh Inspektorat Jenderal Kemkominfo Tahun 2021 .....	55
Tabel 25	Korelasi IKP Ditjen IKP terhadap IKK Kemkominfo .....	57

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi .....	3
Gambar 2	Skema RPJPN 2005-2025 .....	8
Gambar 3	Alur Kerja Government Public Relation .....	10
Gambar 4	Proses Pencapaian Kinerja Ditjen IKP .....	12
Gambar 5	Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik .....	18
Gambar 6	Jenis Media yang Diakses Dalam Sehari .....	20
Gambar 7	Isu Vaksinasi Covid-19 .....	20
Gambar 8	Isu Penanganan Covid-19 .....	21
Gambar 9	Isu Pencegahan Stunting .....	21
Gambar 10	Isu Pemulihan Ekonomi Nasional .....	22
Gambar 11	Isu Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat .....	22
Gambar 12	Activity Highlights PON PEPRANAS .....	31
Gambar 13	Coverage Highlights PON PEPRANAS .....	31
Gambar 14	Kualitas Siaran dan Program GPRTV .....	35
Gambar 15	Konten Prioritas Pemerintah di GPRTV .....	36



# BAB I

## PENDAHULUAN



Dinamika pemanfaatan media serta teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat dan pemerintah dalam berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi. Beragam penyesuaian dalam pelayanan informasi dan komunikasi pemerintahan diperlukan di tengah perubahan itu supaya cita-cita membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa tetap dapat terwujud. Hal itu sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi dan mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta proses dan alasan kebijakan pemerintah. Artinya, komunikasi pemerintah harus dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan terpercaya sebagai upaya mendapatkan kepercayaan publik. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan pada RPJMN 2020-2024 adalah melanjutkan kebijakan sebelumnya bahwa pemerintah akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui penguatan Government Public Relations (GPR).

Government Public Relations (GPR) merupakan program yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Melalui Inpres tersebut dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden menginstruksikan Kementerian dan Lembaga negara untuk:

1. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;
2. menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
3. menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; dan
4. menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

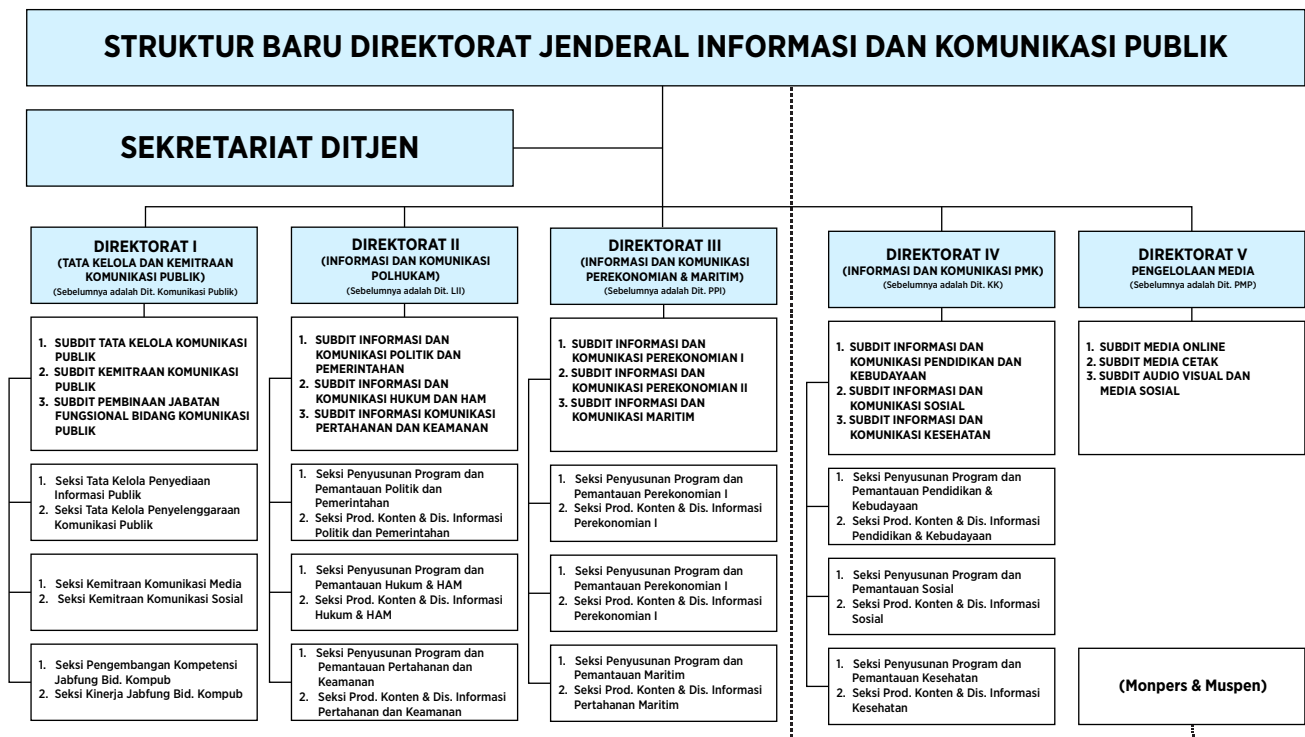
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai koordinator pengelolaan komunikasi publik diberikan tugas khusus untuk:

1. mengoordinasikan perencanaan, penyiaran, dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
2. melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

Kemkominfo sebagai koordinator pengelola komunikasi publik berupaya agar konten informasi terkait dengan program dan kebijakan pemerintah dapat terintegrasi dalam satu “frame” narasi tunggal yang menggunakan data dan sudut pandang komunikasi yang sama. Secara kelembagaan, data yang terintegrasi itu dapat berguna untuk menyinergikan informasi di pemerintah secara horizontal dan vertikal serta menjaring aspirasi masyarakat sebagai masukan kebijakan secara sinergis.

Sesuai amanat Inpres No. 9 Tahun 2015, Kemkominfo dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) memiliki peran terkait dengan pengelolaan diseminasi, edukasi/literasi, klarifikasi, dan menyusun kontranarasi isu terkait kebijakan dan program pemerintah. Untuk menjawab hal tersebut, Ditjen IKP dalam dokumen Rencana Strategis 2020–2024 menetapkan strategi melalui program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik. Pada tahun 2021, fokus yang menjadi acuan dalam perjanjian kinerja untuk mencapai target strategis tersebut adalah adanya peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Koridor yang dijadikan acuan perjanjian kerja tersebut mengacu langsung pada sasaran strategis dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yakni peningkatan terhadap kepuasan masyarakat akan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

## A. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen IKP

Struktur organisasi di lingkungan Ditjen IKP di tahun 2021 awalnya merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, organisasi dan tata kerja di lingkungan Kemkominfo mengalami perampingan melalui Permenkominfo No. 12 Tahun 2021 yang berlaku mulai 5 Oktober 2021. Di lingkungan Ditjen IKP, setiap satuan kerja berdasarkan Permenkominfo No. 12 Tahun 2021 tidak lagi terdiri dari bagian-bagian atau subdirektorat-subdirektorat tetapi terdiri dari beragam kelompok jabatan fungsional. Walaupun secara struktur mengalami perampingan, fungsi Ditjen IKP tetap sama dengan Permenkominfo sebelumnya.

## B. Kedudukan dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, Ditjen IKP memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen IKP memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
4. peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
5. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## C. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Ditjen IKP memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di setiap bidang tugas dan tanggung jawabnya. Total ada 274 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melaksanakan roda organisasi di tahun 2021.

No.	Unit/Satuan Kerja	Jabatan							Jumlah
		Struktural Pimpinan Tinggi		Struktural UPT		Fungsional		Pelaksana	
		Madya	Pratama	Kepala Kantor	Kepala Sub-bagian	Ahli	Terampil		
1.	Ditjen IKP	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat Ditjen IKP	-	1			14	-	32	47
3.	Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik	-	-			19	-	19	38
4.	Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan	-	1			12	-	18	31
5.	Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	-	1			14	2	25	42
6.	Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	1			12	-	23	36
7.	Direktorat Pengelolaan Media	-	-			12	0	22	36
8.	UPT Museum Penerangan	-	-	1	1	6	-	13	21
9.	UPT Monumen Pers Nasional	-	-	1	1	6	1	13	21
Jumlah		1	4	2	2	95	5	165	274

Tabel 1. SDM Berdasarkan Jabatan di Lingkup Ditjen IKP

NO	UNIT/SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA
1	Direktur Jenderal IKP	1	1		
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	47	1	14	32
3	Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik	39	1	19	19
4	Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan	31	1	12	18
5	Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	42	1	16	25
6	Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	36	1	12	23
7	Direktorat Pengelolaan Media	37	1	14	22
8	Museum Penerangan	21	2	6	13
9	Monumen Pers Nasional	22	2	7	13
<b>Jumlah</b>		<b>276</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	<b>165</b>

Tabel 2. SDM Berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen IKP

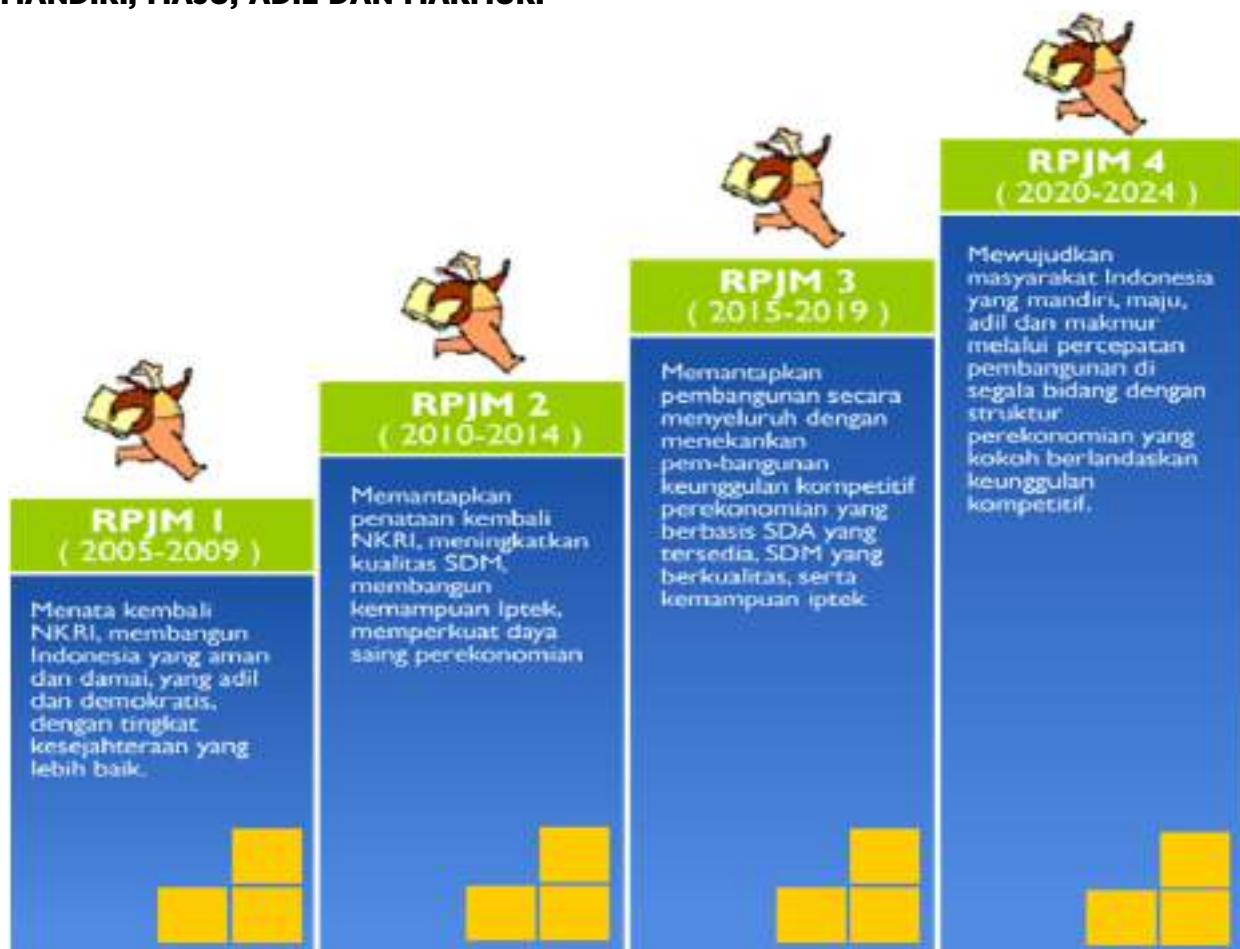


# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

## BAB II | PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan di lingkup Ditjen IKP disusun sebagai acuan dalam rangka mencapai target yang menjadi sasaran atas fungsi dan tugas yang diemban oleh Ditjen IKP. Rencana yang dituangkan dalam dokumen perencanaan tidak terlepas dari sasaran yang dijadikan target oleh pemerintah sesuai visi pembangunan nasional. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025, visi pembangunan nasional adalah mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**.



Gambar 2. Skema RPJPN 2005–2025

Sumber : Bappenas

Perencanaan jangka panjang tersebut merupakan acuan yang menjadi basis arah Rencana Strategis (Renstra) Kemkominfo 2020–2024. Kontribusi yang dilakukan oleh Ditjen IKP dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hal itu tertuang dalam Sasaran Strategis 9 Renstra Kemkominfo 2020–2024 yakni Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

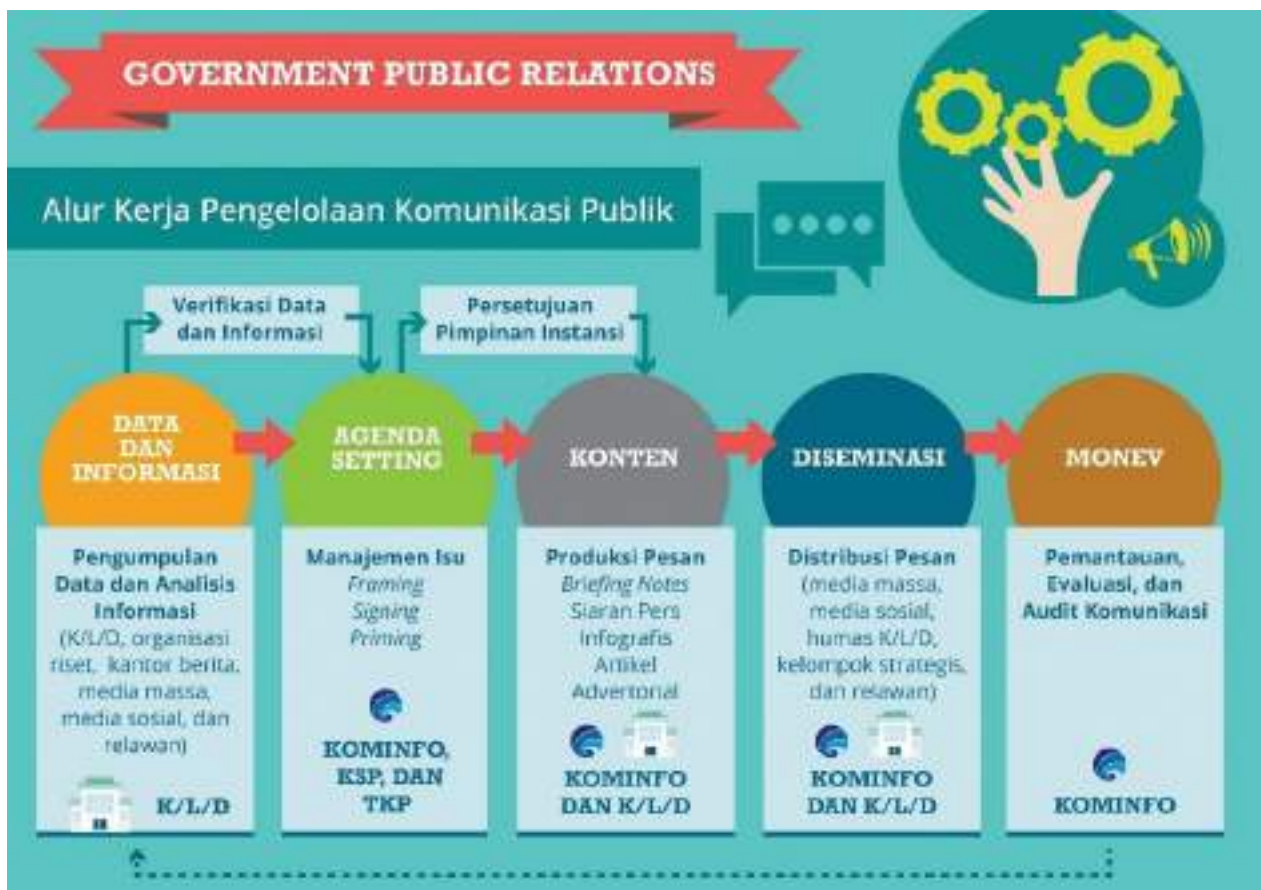


Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Tujuan Strategis:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital</li> <li>3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik</li> </ol>						
<b>SS.09</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>				
Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.01	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif)	71	72	73	74	75

Tabel 3. Indikator Pencapaian Sasaran Strategis IX

Pemerintah yang diberikan amanat rakyat sebagai pelaksana pembangunan senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakannya. Hak atas informasi tersebut tercantum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 F UUD 1945 tersebut dalam implementasinya diperkuat dengan kehadiran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengetahui, berpartisipasi, dan mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. Pemerintahpun di sisi lain dapat lebih mudah mengomunikasikan kebijakannya agar dapat terlaksana dengan baik dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik lewat keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik pada akhirnya menjadi jaminan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka percepatan diseminasi informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden telah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang menugaskan Kemkominfo untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki. Kemkominfo pada prinsipnya dalam hal ini bertindak sebagai dirigen humas pemerintah (Government Public Relation) dalam rangka penyebaran informasi publik program-program pemerintah.



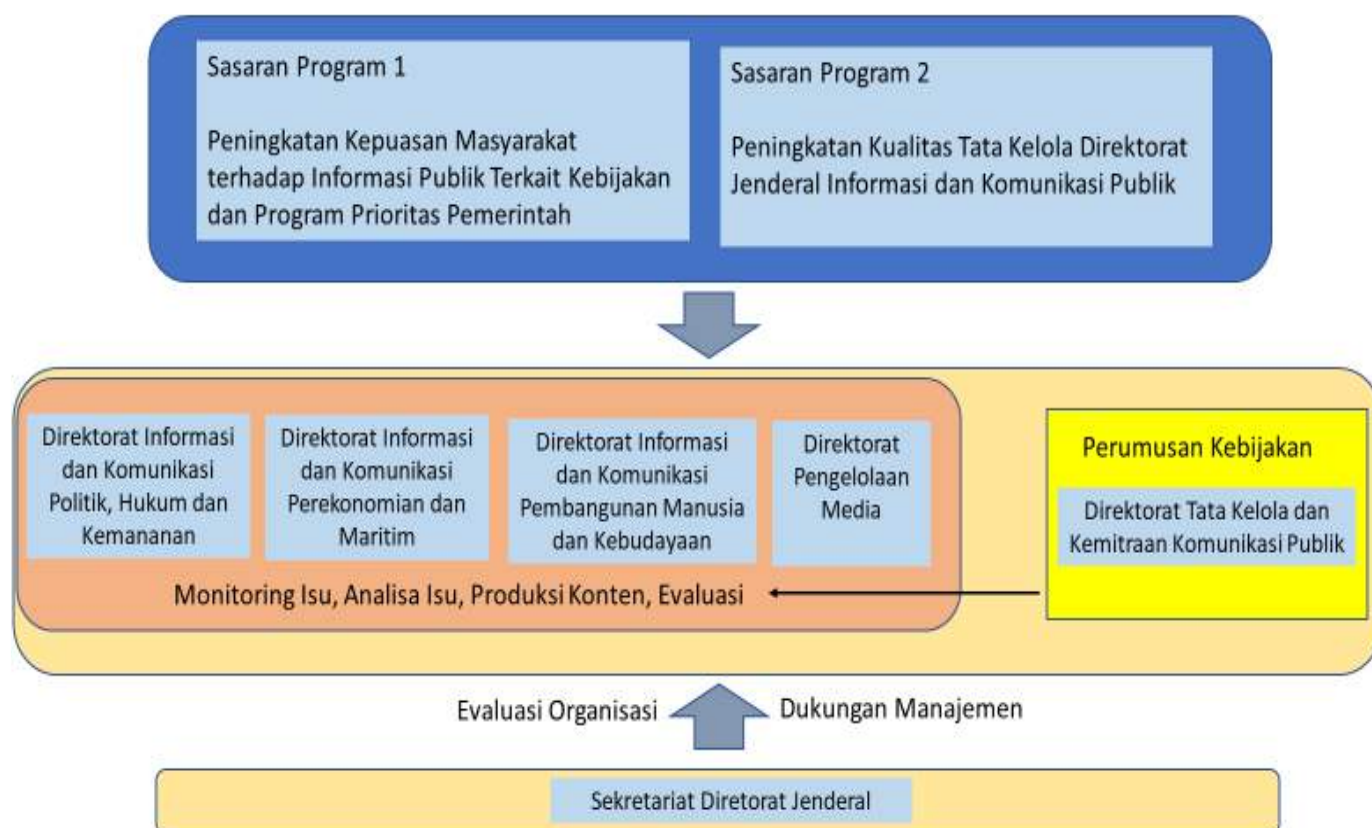
Gambar 3. Alur Kerja Government Public Relation

Dalam menjalankan fungsi Government Public Relation Kemkominfo, Ditjen IKP sepanjang tahun 2021 telah melaksanakan diseminasi informasi program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik *below the line*, *through the line* dan *above the line*. Selain itu, Ditjen IKP dalam melaksanakan diseminasi informasi juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat lainnya. Sepanjang tahun 2021, Ditjen IKP telah melaksanakan kegiatan diseminasi sebagai berikut:

Program	Target Jangkauan	Capaian Jangkauan	%	Keterangan
<b>Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah Sektoral</b>				
Program	Target Jangkauan	Capaian Jangkauan	%	Keterangan
Diseminasi Informasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM	34.000.000	<b>46.290.766</b>	134%	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat; Wawasan Kebangsaan; Literasi Hukum Omnibus Law
Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim	34.000.000	<b>42.413.172</b>	134%	Bangga Buatan Indonesia, Perlindungan Konsumen, Keuangan Inklusi. Waspada Pinjol, Pemberdayaan UMKM
Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:	34.000.000	<b>50.345.288</b>	134%	Penurunan Prevalensi Stunting, Perlindungan & Pendidikan Usia Dini, Program Bansos, Program Dana Desa
<b>Total</b>	<b>101.200.000</b>	<b>135.656.560</b>	<b>134%</b>	

Tabel 4. Volume Kegiatan Sosialisasi Ditjen IKP 2021

Pelaksanaan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu indikator kinerja Kemkominfo yang tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauhmana capaiannya. Pengukuran pelaksanaan pengelolaan informasi publik tersebut mencakup akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik. Di tahun 2021, pengukurannya dilaksanakan melalui survei persepsi bekerja sama dengan Markplus.Inc. Ruang lingkup survei adalah untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.



Gambar 4. Proses Pencapaian Kinerja Ditjen IKP



# BAB III

## AKUNTABILITAS

### A. Capaian Unit Kerja Eselon I

Analisis terhadap capaian kinerja organisasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana capaian atas pelaksanaan target organisasi sebagai tolok ukur yang dapat dijadikan acuan pada periode selanjutnya. Pengukuran dilihat dari capaian hasil dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, acuan yang dijadikan sebagai target adalah dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran program dan indikator kinerja program selama satu tahun. Indikator kinerja sebagai alat ukur dari keberhasilan sasaran program bersifat kuantitatif/kualitatif agar dapat menggambarkan tingkat pencapaian melalui metodologi yang dapat diukur.

#### A.1 Sasaran Program Ditjen IKP

Di tahun 2021, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) memiliki 1 (satu) sasaran program yang mendukung sasaran strategis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sasaran program tersebut adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait dengan kebijakan dan program prioritas nasional. Sasaran program tersebut adalah: 1) Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dengan target >70% dan; 2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Indikator sasaran strategi tersebut dijabarkan menjadi 2 sasaran program yang menjadi target Ditjen IKP yakni:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	72%
		2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	72%
		3. Persentase (%) Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	80%
		4. Jumlah Masyarakat Yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Prioritas Pemerintah Bidang Polhukhankam, Perekonomian dan Maritim, Dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	101,2 Juta Orang
		5. Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Komunikasi Publik Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021	69,3 Juta Orang
		6. Jumlah Masyarakat Yang Terpapar Informasi Kesiapan Indonesia Dalam Perhelatan Event (PON PEPARNAS) Dan Internasional (G-20 Indonesia Presidency 2022)	36 Juta Orang
		7. Persentase (%) Berita Hoax Yang Berhasil Dikonter	65%
		8. Persentase (%) K/L/D Yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku	70%
		9. Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik	63%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang ditetapkan	10 naskah

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik ini yang juga menjadi salah satu indikator kinerja Kemkominfo, diukur dengan melihat persepsi publik atas akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut.





Dalam mengukur ketercapaian kinerja pada sasaran program pertama, digunakan alat ukur yakni survei publik. Sasaran program pertama yakni Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan indikator kinerja sasaran strategis Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dapat tergambar melalui hasil survei yang dilakukan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥ 70%	75%	71%	75,5%	72%	77,7%








Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Komunikasi Publik 3 (tiga) Tahun Terakhir

## A.2 Pengukuran Kinerja

Seluruh target kinerja Ditjen IKP tahun 2021 secara umum dapat tercapai meskipun pada pelaksanaannya terkendala oleh kondisi pandemi yang belum usai. Namun dengan berbagai upaya inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seluruh target dapat tercapai dengan modifikasi platform media sosialisasi yang biasa digunakan. Seluruh capaian kinerja tahun 2021 Ditjen IKP dapat dilihat dalam matriks berikut:

Capaian Kinerja Eselon I Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik TA 2021					
No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2020	Capaian Kinerja	Presentase Capaian	Status
1	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	72%	79%	100%	
2	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	72%	76%	100%	
3	Persentase (%) Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	80%	80%	100%	



4	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Prioritas Pemerintah Bidang Polhukam, Perekonomian dan Maritim, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	101.200.000.000 Orang	135.656.560 Orang	100%	
5	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Komunikasi Publik Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021	69.000.000 Orang	118.470.146 Orang	100%	
6	Jumlah Masyarakat yang Terpapar Informasi Kesiapan Indonesia dalam Perhelatan Event (PON PEPARNAS) dan Internasional (G-20 Indonesia Presidency 2022)	36.000.000 Orang	58.198.112 Orang	100%	
7	Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil dikonter	65%	71%	100%	
8	Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan peraturan yang berlaku	70%	61%	87,54%	
9	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di wilayah 3T terhadap Informasi Publik	63%	70%	100%	
10	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan	10 Naskah	10 Naskah	100%	

Tabel 7. Capaian Kinerja Eselon I Ditjen IKP

Penjelasan Capaian Kinerja:

**A.2.1 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah**  
**Target 72%**  
**Realisasi 79%**

**A.2.2 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah**  
**Target 72%**  
**Realisasi 76%**

Dalam rangka mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah di tahun 2021, dilakukan survei bekerja sama dengan Markplus Inc. Survei itu terkait dengan capaian Indikator kinerja sasaran strategis Ditjen IKP sebagaimana Tabel 6 yakni Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah yang diturunkan kedalam dua Indikator Kinerja Sasaran Program Ditjen IKP sebagai berikut:

1. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah
2. Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Konten Informasi tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah



Gambar 5. Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik

Adapun informasi publik yang diangkat dalam penelitian bekerja sama dengan Markplus Inc berdasarkan dari hasil focus group discussion dengan beberapa stakeholder yang merupakan irisan dari informasi program pemerintah yang didiseminasikan oleh Ditjen IKP dan juga termasuk dalam prioritas nasional, yaitu:

1. Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Pencegahan Stunting/Gizi Buruk
3. Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat

Jumlah sampling sebanyak 400 panel yang disurvei oleh Markplus.Inc di 13 Kota di Indonesia yang dianggap mewakili seluruh masyarakat. Penetapan sampling berdasarkan teori Central Limit Theorem dimana distribusi sampling mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel semakin besar. Apabila jumlah sampel mencukupi ( $n \geq 30$  responden), maka distribusi sampel dapat dianggap memenuhi distribusi normal. Penambahan jumlah responden lebih banyak tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan.

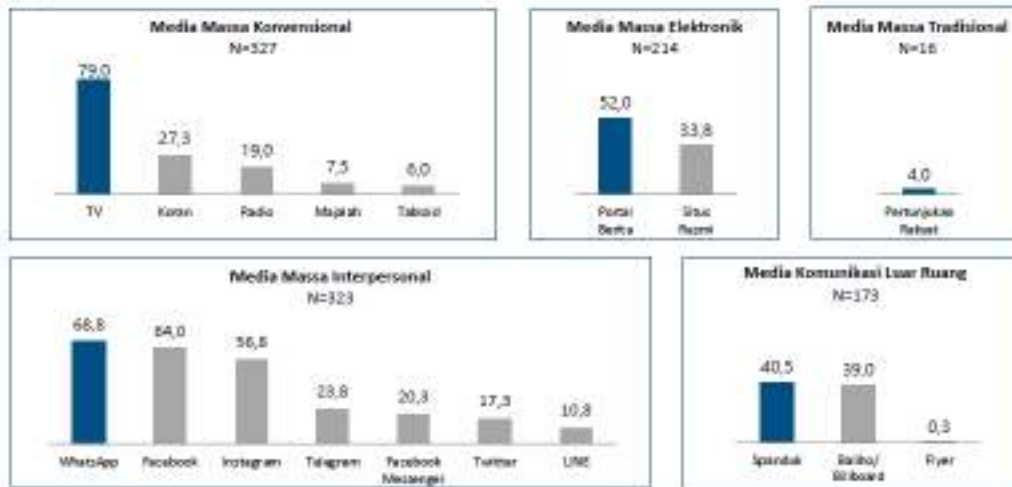
Untuk dimensi kepuasan masyarakat, penelitian ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat beberapa aspek dari masyarakat dalam memperoleh informasi publik dalam hasil survei tersebut.

1. Mayoritas responden setuju bahwa mereka mudah dalam menjangkau informasi. Sebanyak 83% responden mengakses informasi melalui media komunikasi interpersonal (SMS, Aplikasi Chat dan Sosial Media), 78% melalui media konvensional (TV, Radio, Koran dst), 47% mengakui mendapatkan informasi melalui media luar ruang, dan hanya 19% mendapatkan informasi dari media pertunjukan rakyat.
2. Terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh, media online dan televisi adalah media informasi yang paling sering diakses masyarakat.

## JENIS MEDIA YANG DIAKSES DALAM SEHARI

Media online yang paling sering diakses yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram adalah media yang diakses dalam satu hari, sedangkan televisi (TV) merupakan media offline yang paling banyak diakses.

Semua chart dalam %  
N=400



A7. Media sumber informasi apa saja yang Anda akses dalam satu hari? (M)



Sumber: Analisis MarkPlus 2021

Gambar 6: Jenis Media yang Diakses Dalam Sehari

Terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kepuasan akses dan kualitas informasi program prioritas pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

## KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS : VAKSINASI COVID-19

Pada isu Vaksinasi COVID-19, topik informasi dan pemberitaan tersebut tergolong baik pada penilaian responden

Penilaian terhadap kesesuaian informasi, N=354, persen %



C1. Dari skala 1-6, dengan 1 sebagai nilai terendah dan 6 sebagai nilai tertinggi, mohon berikan penilaian Anda terhadap kesesuaian pernyataan mengenai informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas yang Anda simak berikut ini. (M) (Vaksinasi COVID-19)



Sumber: Analisis MarkPlus 2021

Gambar 7: Isu Vaksinasi Covid-19

## KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS : PENANGANAN COVID-19

Pada isu Penanganan COVID-19, topik informasi dapat disediakan dengan baik dan dapat dipercaya oleh responden.

Penilaian terhadap kesesuaian informasi, N=318, persen %



C1. Dari Skala 1-6, dengan 1 sebagai nilai terendah dan 6 sebagai nilai tertinggi, mohon berikan penilaian Anda terhadap kesesuaian pernyataan mengenai informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas yang Anda simak berikut ini. (M) (Penanganan COVID-19)



Sumber: Analisis MaritPlus 2021

Gambar 8: Isu Penanganan Covid-19

## KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS : PENCEGAHAN STUNTING DAN GIZI BURUK

Pada isu Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk, penilaian pada atribut cenderung tinggi dengan tidak adanya skala <5

Penilaian terhadap kesesuaian informasi, N=136, persen %



C1. Dari Skala 1-6, dengan 1 sebagai nilai terendah dan 6 sebagai nilai tertinggi, mohon berikan penilaian Anda terhadap kesesuaian pernyataan mengenai informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas yang Anda simak berikut ini. (M) (Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk)



Sumber: Analisis MaritPlus 2021

Gambar 9: Isu Pencegahan Stunting



## KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS : PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pada isu Pemulihan Ekonomi Nasional, penilaian terhadap topik informasi cukup tersedia dengan baik berikut kemudahan akses informasi yang mudah dijangkau

Penilaian terhadap kesesuaian informasi, N=107, persen %



CL. Dari Skala 1-6, dengan 1 sebagai nilai terendah dan 6 sebagai nilai tertinggi, mohon berikan penilaian Anda terhadap kesesuaian pernyataan mengenai informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas yang Anda simak berikut ini. [M] (Pemulihan Ekonomi Nasional)



Sumber: Analisa MarkPlus 2021

Gambar 10: Isu Pemulihan Ekonomi Nasional

## KESESUAIAN INFORMASI DENGAN ISU PRIORITAS: PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Pada isu program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, penilaian terhadap topik informasi cukup tersedia dengan baik berikut kemudahan akses informasi yang mudah dijangkau

Penilaian terhadap kesesuaian informasi, N=106, persen %



CL. Dari Skala 1-6, dengan 1 sebagai nilai terendah dan 6 sebagai nilai tertinggi, mohon berikan penilaian Anda terhadap kesesuaian pernyataan mengenai informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas yang Anda simak berikut ini. [M] (Program percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat)



Sumber: Analisa MarkPlus 2021

Gambar 11. Isu Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek kepuasan masyarakat diperoleh hasil 77,7% yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini. Detail skor masing-masing aspek kepuasan adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Skor (%)
<b>Aspek Konten</b>		
1	Kualitas Informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi	76,4%
2	Kualitas Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi	75,8%
3	Kualitas Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan	77,2%
<b>Aspek Aksesibilitas</b>		
4	Akses Informasi dan pemberitaan mudah dijangkau	78,1%
5	Akses Informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik	81,4%
	Indeks: (V1+V2+V3+V4+V5): 6	<b>77,7</b>

Tabel 8. Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik  
Terkait Isu Prioritas Nasional 2021

### **A.2.3 Persentase (%) Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional**

**Target 80%**  
**Realisasi 80%**

Sepanjang, 2021 Ditjen IKP Kemkominfo RI melaksanakan kegiatan penguatan komunikasi publik dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memiliki 2 (dua) isu utama, yaitu:

1. Penanganan COVID-19 meliputi program seperti vaksinasi dan adopsi perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan; serta
2. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri atas perlindungan sosial dan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berbagai program komunikasi publik telah diselenggarakan selama tahun 2021 untuk mendukung kesuksesan program PCPEN tahun 2021. Oleh karena itu dibutuhkan upaya mengukur efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan

KPCPEN dalam bentuk survei yang mengukur persepsi dan partisipasi masyarakat atas program PCPEN tahun 2021 yang menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Ditjen IKP.

Pelaksanaan diseminasi dengan tema PCPEN dilakukan melalui berbagai macam kanal media guna dapat menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat. Total dalam satu tahun diseminasi yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP dapat menjangkau sebanyak 118 juta orang. Guna dapat melihat outcome dari penyebaran informasi tersebut maka dilaksanakan pengukuran melalui survei kepada 1.210 responden yang tersebar di 11 provinsi dengan pendekatan distribusi sampel pada kewilayahan.

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk*	Jumlah Responden	
			Perhitungan	Pembulatan
1.	Jabar	48,274,162	288	288
2.	Jatim	40,665,696	243	246
3.	Jateng	36,516,035	218	222
4.	Sumut	14,799,361	88	88
5.	Banten	11,904,562	71	72
6.	DKI Jakarta	10,562,088	63	63
7.	Sulsel	9,073,509	54	54
8.	Lampung	9,007,848	54	54
9.	Sumsel	8,467,432	51	51
10.	Riau	6,394,087	38	38
11.	NTT	5,325,566	32	34
Jumlah			1.200	1.210

Tabel 9. Survei PCPEN



Bagian	Variabel Independen (% capaian)	Variabel Dependen (% capaian)
Informasi COVID-19	Kredibilitas Sumber Pesan (78%)	Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (74%)
	Kelompok Institusional (82%)	
	Kelompok Sosial (69%)	
Program Vaksinasi	Kelompok Institusional (83%)	Partisipasi (85%)
	Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (75%)	
	Recall Pesan (76%)	
Protokol Kesehatan	Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (82%)	Perilaku sesuai Protokol Kesehatan (86%)
	Persepsi terhadap Pesan dan Sumber Pesan (86%)	
	Recall Pesan (71%)	
PPKM	Recall Pesan (77%)	Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (78%)
	Persepsi terhadap pesan dan Sumber Pesan (80%)	
	Kelompok Institusional (73%)	
PEN	Partisipasi (68%)	Outcome Komunikasi (Sikap dan Perilaku) (77%)
	Kelompok Institusional (83%)	
	Recall Pesan (64%)	
	Kelompok Sosial (68%)	

**Mean: 80%**

Tabel 10. Variabel dalam Penguatan Komunikasi Publik

Dalam konteks riset efektivitas komunikasi publik KPCPEN ini, *outtakes* dan *outcomes* diaplikasikan sebagai komponen pengukuran untuk memberikan gambaran respons khalayak terhadap sumber dan pesan kunci terkait sejumlah isu utama KPCPEN. Kemudian, *outtakes* dan *outcomes* diturunkan menjadi sejumlah elemen pengolahan informasi, yakni:

1. *Outtakes* program komunikasi publik pada khalayak sasaran, meliputi:
  - a. Kemampuan mengingat kembali pesan (*recall*)
  - b. Kredibilitas sumber (*existing and ideal source credibility*)
  - c. Persepsi terhadap pesan (*perception*)
2. *Outcomes* program komunikasi publik pada khalayak sasaran, meliputi:
  - a. Sikap (*attitude*)
  - b. Perilaku (*behavior*)

Secara rerata, komunikasi publik KPCPEN (selama Januari hingga November 2021) secara keseluruhan sudah efektif dalam kisaran kriteria cukup hingga tinggi, terlihat dari outtakes & outcomes pesan semua program dinilai 'baik' atau 'sangat baik', kecuali recall informasi COVID-19 & PEN yang dinilai 'cukup'. Hal ini karena keterpaparan informasi tinggi di semua program (>80%), kecuali program PEN (65% dan 58%).

**A.2.4 Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Prioritas Pemerintah Bidang Polhukhankam, Perekonomian dan Maritim, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**  
**Target 101 Juta Orang**  
**Realisasi 135 Juta Orang**

Program	Target Jangkauan	Capaian Jangkauan	%	Keterangan
<b>Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah Sektor</b>				
Diseminasi Informasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM	34.000.000	<b>46.290.766</b>	134%	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat; Wawasan Kebangsaan; Literasi Hukum Omnibus Law
Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim	34.000.000	<b>42.413.172</b>	134%	Bangga Buatan Indonesia, Perlindungan Konsumen, Keuangan Inklusi. Waspada Pinjol, Pemberdayaan UMKM
Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:	34.000.000	<b>50.345.288</b>	134%	Penurunan Prevalensi Stunting, Perlindungan & Pendidikan Usia Dini, Program Bansos, Program Dana Desa
<b>Total</b>	<b>101.200.000</b>	<b>135.656.560</b>	<b>134%</b>	

Tabel 11. Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah Sektor

Pelaksanaan diseminasi informasi publik terkait program prioritas pada 2021 dilaksanakan melalui 3 aktivitas penyebaran. Ketiga aktivitas tersebut *above the line* (ATL), *below the line* (BTL), serta *through the line* (TTL). Penggunaan 3 aktivitas berbeda tersebut disesuaikan dengan target dari tujuan diseminasi tersebut.

Tujuan pertama ialah meningkatkan *awareness* terhadap pesan yang disampaikan, hal ini berkaitan dengan hasil yang dituju oleh sasaran program Ditjen IKP dimana kualitas informasi yang diberikan dapat mencapai tingkat pengenalan oleh setiap masyarakat. Selanjutnya ialah peningkatan *conversion/engagement* dimana setiap masyarakat yang menerima diseminasi informasi diharapkan dapat ikut memberikan feedback.

Sumber penghitungan terkait capaian jangkauan tersebut didapat dari data potensi jangkauan yang dimiliki setiap kanal-kanal media. Secara garis besar penghitungan dapat dilakukan melalui rumus yang telah disepakati oleh sebagai berikut :

## Media TV

Rumus :

Jangkauan/Reach = Rating Program TV x 1.000.000

(angka default yang dirumuskan oleh Nielsen)



## Media Radio

Rumus :

Jangkauan/Reach = Jumlah pendengar radio x 15%



## Media Luar Ruang

Rumus :

Jangkauan/Reach = data traffic x jumlah hari x 5%



## Media Sosial

Rumus :

Jangkauan/reach = jumlah engagement



## Media Online

Rumus :

Jangkauan non-owned media

(bukan kanal media Ditjen IKP) = jumlah pageviews

Jangkauan owned media

(kanal-kanal milik Ditjen IKP) = jumlah visitor



## Media Cetak

Rumus :

Jangkauan = (Jumlah oplah x potential reader) + subscriber e-papers



Surat Kabar Harian potential reader = 70%.

Surat Kabar Mingguan potential reader = 85%.

**A.2.5 Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik Tentang Kebijakan & Program Komunikasi Publik Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021.**

**Target 69 Juta Orang**

**Realisasi 118.121.090 Orang**

**TEMA KHUSUS: DISEMINASI PCPEN**

No	Uraian	Media	Reach
1.	Pemasangan Billboard, Videotron, serta TV Bandara di 26 Provinsi dengan total 184 titik tayang	Media Luar Ruang	24.221.090
2.	Penayangan ILM, Talk Show, Running Text dengan di 17 TV Nasional dan TVRI Pelaksanaan dialog intreraktif sebanyak 104 kali di 10 TV Nasional	Televisi	40.000.000 atau 15% dari total pangsa pemirsa TV
3.	Penayangan 494 Spot Artikel dan 40 Spot Banner Penayangan ILM	Media Online	42.000.000
4.	Penayangan 105 Spot artikel/banner di 8 Media Cetak Nasional, 13 Media Cetak Lokal dan 2 Tabloid Nasional	Media Cetak	6.900.000
5.	Penayangan ILM, Diskusi serta adlibs dengan tema (Ayo Jangan Egois) pada 25 radio lokal di 15 provinsi	Radio	5.000.000
<b>Total</b>			<b>118.121.090</b>

Tabel 12. Diseminasi PCPEN

**A.2.6 Jumlah Masyarakat yang Terpapar Informasi Kesiapan Indonesia dalam perhelatan Event (PON PEPARNAS) dan Internasional (G-20 Indonesia Presidency 2022)**

**Target 36 Juta Orang**

**Realisasi 58 Juta Orang**

Ditengah masa Pandemi yang berangsur terkendali, pada bulan Oktober 2021 pesta olahraga terbesar di Indonesia yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) serta Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) digelar. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, Tugas Menkominfo dalam hal ini diturunkan kepada Ditjen IKP adalah memfasilitasi perizinan untuk broadcast, menyediakan media center, jaringan internet, dan melaksanakan sosialisasi.

Dengan target 36.000.000 masyarakat yang terpapar informasi kesiapan Indonesia dalam perhelatan Event (PON PEPARNAS) dan Internasional (G-20 Indonesia Presidency 2022) pada 2021 Ditjen IKP telah melaksanakan kegiatan diseminasi yang menjangkau 52.978.056 orang dengan rincian

No	Uraian	Media	Reach	Engagement
1.	Penayangan ILM Sukseskan PON XX di Merauke, Sorong, Jayapura, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jakarta dan NTT	Media Luar Ruang	4.455.650	-
2.	Produksi 140 Konten yang disebarluaskan di IG dan FB milik DJIKP	Media Sosial	7.911.049	4.223.545
3.	Penayangan Dialog Interaktif dengan di 4 TV Nasional	Televisi	6.456.946 atau 3% dari total pangsa pemirsa TV	-
4.	Placement di 23 Media Online Nasional dan Lokal	Media Online	8.700.000.	-
5.	Advetorial 100 hari menjelang PON XX di majalah Tempo dan Harian Media Indonesia	Media Cetak	1.500.000	-
6.	Produksi artikel berita 140 Konten yang disebarluaskan di infopublik.id	Media Online	6.000.000	1.898.500
7.	Pelaksanaan 3 kali FMB9 dengan tema : a) 100 Hari jelang PON b) 80 Hari jelang PON c) 70 Hari jelang PON	Media Milik DJIKP	5.075.411	
<b>Total</b>			<b>42.099.056</b>	<b>6.122.045</b>

Tabel 13 . Diseminasi PON PEPARNAS



## ACTIVITY HIGHLIGHTS



Gambar 12 Activity Highlights PON PEPRANAS

## COVERAGE HIGHLIGHTS



Media Indonesia, 14 Nov 2021



Cendrawasih Post, 6 Nov 2021



Tempo.co, 13 Nov 2021

Gambar 13 Coverage Highlights PON PEPARNAS

Sementara terkait perhelatan KTT G-20, pada tahun 2021 telah pula dilaksanakan aktivitas diseminasi sebagai awal pengenalan menuju perhelatan yang akan digelar pada 2022 dengan total jangkauan sebanyak 10.870.000 orang dengan rincian:

No	Uraian	Media	Reach	Engagement
1.	Placement artikel di 3 Media Nasional	Media Cetak	850.000	-
2.	Produksi Konten yang disebarluaskan di IG dan FB milik DJIKP serta G20 Indonesia	Media Sosial	120.000	2400
3.	Amplifikasi Narasi Pidato G20 di TV One dan Metro TV	Televisi	1.200.000	-
4.	Penayangan OOH G20 di 2 titik lokasi Jakarta dan Bali	Media Luar Ruang	8.700.000.	-
<b>Total</b>			<b>10.870.000</b>	<b>2400</b>

Tabel 14. Aktivitas Diseminasi KTT G-20

#### **A.2.7 Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil dikonter**

**Target 65%**

**Realisasi 80%**

Pelaksanaan konter berita hoaks diambil dari data yang terhimpun pada laman <https://trustpositif.kominfo.go.id/> dengan kategorisasi hoaks. Konter hoaks dilakukan dengan membuat konten berjenis audio-video atau teks yang dimuat di kanal-kanal media milik Ditjen IKP.



Bidang	Temuan	Konter	%	Keterangan
<b>Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah Sektoral</b>				
Bidang Politik, Hukum, dan HAM	100	80	80%	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat; Wawasan Kebangsaan; Literasi Hukum Omnibus Law
Bidang Perekonomian dan Maritim	70	60	90%	Bangga Buatan Indonesia, Perlindungan Konsumen, Keuangan Inklusi. Waspada Pinjol, Pemberdayaan UMKM
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	90	70	80%	Penurunan Prevalensi Stunting, Perlindungan & Pendidikan Usia Dini, Program Bansos, Program Dana Desa
<b>Total</b>	<b>260</b>	<b>190</b>	<b>80%</b>	

Tabel 15. Konter Berita Hoaks

**A.2.8 Persentase (%) K/L/D yang Sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan Peraturan yang Berlaku**  
**Target 70%**  
**Realisasi 61,73%**

Berangkat dari kebutuhan pragmatis (kebijakan pemerintah), pengukuran Indeks PIKP tahun 2021 mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum yaitu: “Bagaimana tingkat kinerja atau indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik instansi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2021?”

Upaya pengukuran ini setidaknya diharapkan dapat menghasilkan dua output yaitu: 1) alat ukur yang objektif dan komprehensif terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Indonesia; serta 2) data empiris yang menjadi acuan penyusunan program-program intervensi Kementerian Kominfo yang terkait dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistem (Input-Proses-Output-Outcome), dengan data kuantitatif sebagai basis penghitungan Indeks. Data untuk dimensi Input dan Proses berasal dari hasil survei dengan self-administered questionnaires terhadap unit-unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di 64 instansi pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga Non-kementerian) yang dipilih secara purposive, dan di 34 instansi pemerintah daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi) yang merupakan total sampling. Data untuk dimensi Output dan Outcome berasal dari hasil survei sampel dengan jumlah responden anggota masyarakat sebanyak 1.600 orang di 34 Ibukota Provinsi yang dipilih secara acak proporsional menurut jumlah dan karakteristik penduduk di masing-masing kota.

Berdasarkan hasil survei Indeks PIKP ini diperoleh hasil indeks 61,73 dengan rincian dimensi input 65,6; dimensi proses 67,4; dimensi output 60,8; dan dimensi outcome 53,1. Hasil survey 61,73 berada di bawah target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2021 yakni 70.

Terdapat faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain salah satu dimensi input yang diukur adalah ketersediaan anggaran untuk beberapa kegiatan kehumasan dan PPID, namun karena terdapat instansi yang mengalami refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan di instansi yang tidak ada anggaran dan tidak dilaksanakan dan menyebabkan angka indeks turun.

Dimensi input lainnya yang diukur penyediaan bahan informasi tentang program prioritas, ada 39 program prioritas yang merupakan program K/L namun setiap K/L menyediakan bahan informasi tersebut hanya sesuai tusi yang memuat setidaknya dua sampai tiga program saja sehingga banyak data yang kosong sehingga angkanya turun.

### A.2.9 Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T terhadap informasi Publik

**Target 63%**

**Realisasi 70%**

Pelaksanaan diseminasi di wilayah 3T dilaksanakan melalui kanal GPRTV yang merupakan media milik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. GPRTV disiarkan kepada masyarakat Indonesia, terutama wilayah 3T melalui satelit & internet yang dapat dijangkau melalui parabola dan smartphone. Pengukuran terkait indikator ini dilakukan dengan melaksanakan survei online dan pendekatan kuis yang dilaksanakan pada bulan November – Desember 2021 dengan sampling sebanyak 404 orang yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling, yakni pemirsa GPRTV.

Responden sendiri tersebar di 188 Kab/Kota di 29 Provinsi dimana 24 Kab/Kota diantaranya merupakan daerah 3T. Jika dirincikan lagi, jumlah tersebut setara dengan 21% dari total 117 Kab/Kota yang termasuk wilayah 3T. Secara umum, lebih dari 70% responden menilai kualitas siaran dan program GPRTV berkategori baik.

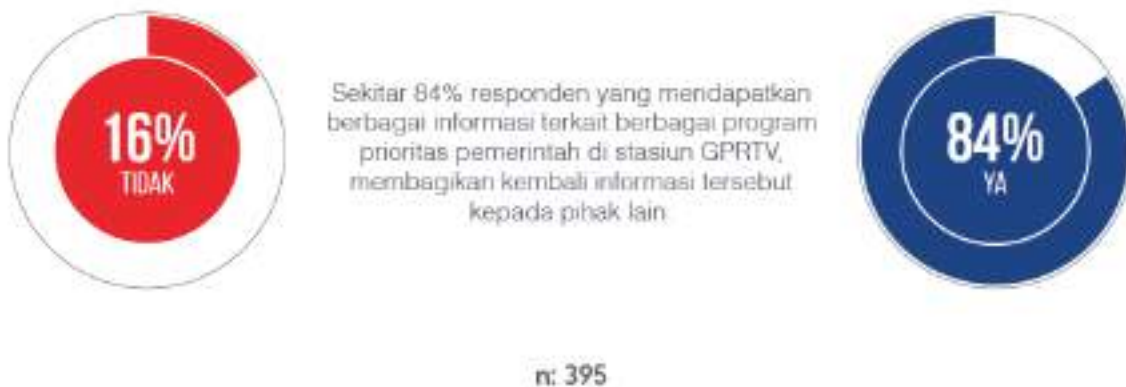


Gambar 14. Kualitas Siaran dan Program GPRTV

Hal yang menarik dari temuan pengukuran ini adalah, sekitar 84% responden menyatakan membagikan kembali informasi yang mereka dapatkan melalui tayangan GPRTV kepada pihak lain. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa tayangan yang didapat dapat dijadikan acuan referensi bagi masyarakat dalam mencari serta mencerna suatu informasi terkait program prioritas pemerintah.

## MEMBAGIKAN KONTEN PRIORITAS PEMERINTAH

Konten prioritas pemerintah meliputi penanganan pandemi COVID-19 (vakansi, protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pemulihan ekonomi berupa bantuan sosial (Bansos), UKM, dll), pembangunan infrastruktur, Peraturan KPK, pariwisata Indonesia, Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law), pencegahan Stunting (jarak kuning gal).



Gambar 15. Konten Prioritas Pemerintah di GPRTV

### **A.2.10 Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan** **Target 10 Naskah** **Realisasi 10 Naskah**

Sepanjang tahun 2021 telah disusun dokumen Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi di K/L/D, diantaranya:

#### **1. Kajian Desain dan Indikator Pembinaan Kompetensi JFPH**

Penyusunan Kajian Desain dan Indikator Pembinaan Kompetensi JFPH ini dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan arah kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas periode 2022 - 2027 bagi pelaksana dan para pihak terkait yang menangani pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas tersebut dalam rangka membina Pejabat Fungsional Pranata Humas agar memiliki karir yang jelas dan kompetensi yang sama dengan humas swasta.

#### **2. Kajian Kompetensi Standar Kualitas Hasil Kerja JFPH**

Kajian Kompetensi Standar Kualitas Hasil Kerja JFPH ini merupakan kajian tentang definisi atau ruang lingkup butir kegiatan dari RPM PAN RB JFPH yang sedang diusulkan dan format laporan, berdasarkan pengalaman langsung dari pemangku jabatan yang sudah pernah mengerjakan kegiatan yang serupa.

**3. Kajian Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis JFPH**

Kajian penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis JFPH ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelatihan fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kominfo secara blended learning.

**4. Kajian Kompetensi Pengembangan Profesi JFPH**

Kajian ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pranata Humas baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dokumen ini bertujuan agar adanya kesamaan pemahaman antar Pranata Humas, atasan langsung, dan Tim Penilai pelaksanaan pengembangan profesi JFPH. Selain itu, Pranata Humas dapat melaksanakan pengembangan profesi yang merupakan unsur utama sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

**5. Pedoman Penyusunan Karya Tulis JFPH**

Kajian ini dimaksudkan sebagai pedoman Pranata Humas dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pelayanan informasi dan kehumasan, pengembangan profesi, yang merupakan unsur pertama, serta unsur penunjang sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

**6. Kajian Rancangan Perpres Kerangka Komunikasi Publik**

Kajian ini menelusuri peraturan perundang-undangan (PUU) baik terkait sub-urusan Informasi dan Komunikasi Publik, yang menjadi bagian dari Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (non pelayanan dasar), ataupun terkait tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kajian ini juga meneliti kasus-kasus komunikasi publik yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi dari peri kehidupan sosial.

**7. Kajian kebijakan DAK Sub Urusan IKP**

Pekerjaan terhadap kajian Kebijakan DAK Sub Urusan IKP ini bertujuan untuk menyediakan kajian urgensi dan proposal DAK Pelayanan Informasi Publik, yang dilaksanakan oleh PPID di Dinas Kominfo untuk membantu perangkat daerah

yang kekurangan dana dalam mendukung kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat di daerahnya. Sasaran kajian urgensi DAK Pelayanan Informasi Publik ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID di Dinas Kominfo dengan dukungan DAK yang bersumber dari APBN.

**8. Juknis Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**

Penyusunan petunjuk teknis kemitraan dengan pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung Ditjen IKP Kementerian Kominfo dalam rangka mengoptimalkan koordinasi teknis (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi) dengan Dinas Kominfo Provinsi / Kabupaten/ Kota dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

**9. Regulasi tentang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)**

Draft revisi Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas yang kemudian menjadi acuan penyusunan RPM Kominfo terkait Juknis JFPH. Tahun 2019, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik mengusulkan perubahan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

Hal yang mendasari perubahan peraturan Menteri dimaksud adalah:

- a. Adanya Perubahan Regulasi
- b. Irelevansi Unsur Kegiatan JFPH dengan Kondisi dan Kebutuhan Terkini
- c. Multi-interpretasi atas Sub Unsur Kegiatan JFPH
- d. Ketidakjelasan perbedaan antara Pranata Humas Terampil dan Ahli
- e. Belum Adanya Jenjang Pranata Humas Utama
- f. Penilaian Angka Kredit Masih Berbasis Proses

Maksud perubahan PM PAN RB Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk menyelaraskan Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas dengan perubahan regulasi di atasnya yang terkait dengan JFPH, serta memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan informasi dan kehumasan di era revolusi TIK.

Adapun tujuan perubahan PM PAN RB Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk:

- a. Meningkatkan kompetensi dan karir JFPH sesuai dengan perubahan dan dinamika masyarakat;

- b. Mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas JFPH dalam menunjang tugas dan fungsi unit kerja;
- c. Mendorong peningkatan motivasi dan profesionalitas kerja JFPH;
- d. Mewujudkan keberadaan JFPH Jenjang Ahli Utama yang mampu melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan tingkat tinggi.

Manfaat Perubahan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya adalah:

**a. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur JFPH, keberadaan JFPH diharapkan dapat melaksanakan diseminasi informasi dan menyerap aspirasi masyarakat secara optimal melalui media yang paling banyak dipergunakan masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan (right to know) dapat terpenuhi, dan di sisi lain aspirasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah dapat tersalurkan. Melalui JFPH, masyarakat juga bisa mendapatkan konfirmasi terkait isu atau informasi yang belum jelas kepastian dan kebenarannya, serta mendapatkan bantuan untuk mendapatkan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**b. Bagi Pemerintah**

Melalui perubahan regulasi ini, tugas JFPH sebagai government public relations diharapkan bisa lebih kuat. Tugas ini bukan saja meliputi diseminasi informasi tentang program dan kebijakan yang wajib disampaikan pemerintah (obligation to tell), tetapi juga mencakup media relations, pelayanan informasi publik, aktivitas juru bicara yang mampu mengontrol agenda setting media, media monitoring, serta melakukan audit persepsi publik.

**c. Bagi Pemangku Jabatan**

Dengan adanya revisi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2014 maka JFPH dapat mengembangkan kompetensi dan karir hingga ke jenjang Utama. Rumusan butir kegiatan yang direvisi menjadi lebih jelas dan terukur akan memudahkan JFPH memenuhi angka kredit yang disyaratkan sehingga kinerja JFPH menjadi lebih baik dan semakin profesional.



Proses Pengusulan Revisi PM PAN Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya adalah:

**a. Pengusulan Naskah Akademik Revisi PM PAN RB No. 6 Tahun 2014**

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik c.q Subdit Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik telah mengusulkan naskah akademik dimaksud pada bulan Mei tahun 2019.

**b. Ekspose dan pemaparan naskah akademik**

Setelah dikirimkan, pada Juni 2019, Kementerian PAN dan RB mengundang Direktorat untuk memaparkan usulan perubahan PM PAN RB No 6 Tahun 2014.

**c. Uji Beban Kerja JFPH**

Setelah usulan dimaksud telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB, maka dilakukan uji beban kerja dengan responden uji beban kerja adalah seluruh Pranata Humas yang telah memiliki ijazah sarjana. Lokasi uji beban kerja adalah untuk Pranata Humas di instansi pusat, Jambi (beban kerja rendah), Kalimantan Timur (beban kerja sedang), dan Jawa Timur (beban kerja tinggi).

**d. Input, Pengolahan dan Validasi Butir Kegiatan JFPH**

Saat ini, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik telah melakukan input dan pengolahan butir kegiatan dan beban kerja bagi revisi PM PAN RB No. 6 Tahun 2014.

**e. Harmonisasi RPM PAN RB**

**f. Penetapan**

Di tahun 2021, proses harmonisasi terus dilakukan. Pada awal tahun 2021, Angka Kredit sudah divalidasi bersama Kementerian PAN RB dan BKN. Setelah itu, ada revisi minor dari hasil masukan Kemen PAN RB dan Biro Kepegawaian Kominfo. Draf RPM PAN RB yang ada kemudian menjadi acuan penyusunan RPM Kominfo terkait Juknis JFPH yang pada akhir tahun 2021 telah diserahkan ke Bagian Hukum Sesditjen.

## **10. Regulasi mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk Konter Narasi Negatif, Hoaks, dan Informasi Misleading**

Tujuan dilakukannya Kajian tentang NSPK untuk Konter Narasi Negatif, Hoaks dan Informasi Misleading adalah untuk mengkaji kelembagaan dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk urusan wajib non pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informasi yang terkait dengan instansi pemerintah daerah, mengkaji proses bisnis atas pengelolaan/ penanganan hoaks yang telah diselenggarakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga yang telah diselenggarakan di unit kerja terkait di daerah, serta merekomendasikan NSPK untuk pengelolaan/penanganan hoaks yang terpadu di instansi pemerintah baik secara vertikal ataupun horizontal.

## **B. Capaian Unit Kerja Eselon II**

### **1. Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik**

Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (Direktorat TKKKP), sebagai bagian dari Ditjen IKP, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi publik. Kinerjanya difokuskan kepada perwujudan tata kelola sistem komunikasi di Indonesia, pelaksanaan kebijakan komunikasi, dan peningkatan kompetensi lembaga maupun aparatur pelayanan komunikasi dan informasi.

Secara umum capaian kinerja Direktorat TKKKP tahun 2021 dapat disimpulkan mencapai target dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Terlaksananya Pengelolaan Komunikasi Publik di K/L/D sesuai Inpres 9 Tahun 2015.	Jumlah K/L yang Melakukan Penyebaran Informasi Narasi Tunggal.	50	Total K/L yang melakukan penyebaran Narasi Tunggal sejumlah 68 K/L dengan total 26 konten narasi tunggal	136
		Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional.	160	Terdapat 229 Pemerintah Daerah yang melakukan diseminasi melalui GPR Widget.	143
		Jumlah Dokumen Standardisasi Pengelolaan Komunikasi Publik.	7	1. 1 dokumen uji kompetensi JFPH 2. Dokumen grand design Komunikasi publik telah selesai namun kajian rancangan perpresnya belum terlaksana 3. Dokumen Juknis Pengelolaan Hubungan Media 4. Dokumen Juknis Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik 5. Juknis Layanan Informasi Publik 6. Juknis Monitoring Isu dan Manajemen Krisis Tambahan Dokumen yang selesai di bulan Desember 7. Draft PM JFPH	100
2	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang komunikasi di K/L/D.	Persentase (%) Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi yang Meningkatkan Kompetensinya.	40%	45 %	112
		Peningkatan (%) Kualitas Kinerja PPID.	40%	74%	185
		Persentase (%) Pemda yang Melaksanakan Sub Urusan IKP sesuai NSPK.	40%	Nilai Survey biro perencanaan dengan skala 0-3. Rerata Total nilai IKP adalah 2,0840 dikonversi dengan asumsi pembobotan persentase menjadi 40%	100

3	Peningkatan Kapasitas Mitra Komunikasi dalam Pengelolaan Komunikasi Publik.	Persentase (%) Meningkatnya Kapasitas Mitra Komunikasi Media dan Sosial dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.	25%	44,5%  Nilai yang diperoleh dari hasil survey yang diadakan ketika aktivitas webinar pada Penyuluh Informasi Publik, Satgas Medsos, dan Kelompok Informasi masyarakat.	178
4	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Kebijakan Komunikasi Publik.	Persentase (%) Peningkatan Akses Informasi Publik oleh Masyarakat Melalui PPID	50%	Nilai 39% diperoleh dari perhitungan permintaan akses informasi publik pada 4 kota yang menerima sosialisasi melalui webinar, yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Bali. dari empat lokasi tersebut diketahui bahwa hanya Provinsi NTB yang mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik di atas 50% yaitu 489%, provinsi Jawa Tengah hanya mengalami peningkatan sekitar 23%, sedangkan dua wilayah lainnya yaitu Kalimantan Timur dan Bali mengalami penurunan partisipasi masyarakat untuk mengakses informasi publik	78

Tabel 16. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Tahun 2020

## 2. Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan

Sebagai salah satu Unit kerja di bawah Ditjen IKP, Penetapan Kinerja Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan (IK Polhukam) untuk Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Ditjen IKP Kemkominfo. Direktorat IK Polhukam sesuai dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2018 mempunyai tugas untuk melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi politik, hukum dan keamanan.

Seluruh target dalam perjanjian kinerja Direktorat IK Polhukam tahun anggaran 2021 mampu dicapai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Tersebar nya Informasi Publik yang Berkualitas Melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Luar Ruang, Media Tatap Muka, Pertunjukan Rakyat dan Internet.	Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Media Elektronik.	5.000.000	91,017,617	1,820%
		Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Media Luar Ruang.	3.500.000	638,799,851	18,251%
		Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Media Tatap Muka dan Petunra	1.500	3,147	209%
		Jumlah Jangkauan Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Polhukam melalui Internet.	10.500.000	27,683,915	263%

Tabel 17. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Polhukam Tahun 2021

### Capaian Khusus:

#### Diseminasi Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Wilayah Papua dan Papua Barat

Selain pandemi, jarak merupakan salah satu hambatan dalam diseminasi informasi terkait penanganan isu Papua dan Papua Barat. Dengan kegigihan dan semangat bela negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat IK Polhukam berhasi melakukan kegiatan Dialog Interaktif di berbagai media, Kampanye Digital, dan Produksi Konten Advetorial Media Online dengan isu-isu terkait pembangunan Papua dan Papua Barat serta Otonomi Khusus. Keberhasilan berbagai kegiatan diseminasi informasi tersebut adalah bukti Direktorat IK Polhukam mendukung terlaksananya Inpres Tahun 2020.

### **3. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim**

Dalam rangka implementasi sasaran strategis organisasi, setiap tahunnya perencanaan strategis dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian kinerja tahunan. Dokumen tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode satu tahun ke depan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktorat IKPM) dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Direktorat IKPM sesuai dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2018 mempunyai tugas adalah melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi perekonomian dan maritim.

Secara umum seluruh target kinerja tahun 2021 Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim dapat tercapai. Adapun rincian capaian dari perjanjian kinerja Direktorat IKPM Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya jangkauan penyebaran informasi dan program prioritas pemerintah	Persentase (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	91	130
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media elektronik	8.000.000	32.850.000	410
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media cetak	1.000.000	1.560.000	156
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media online	2.500.000	4.550.000	182
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media sosial	50.000	56.466	112
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media tatap muka dan pertunra	20.000	50.063	250
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan maritim melalui media luar ruang	1.000.000	2.560.000	256
		Persentase (%) Berita Hoax yang berhasil diklarifikasi bidang perekonomian dan maritim	65%	91	140
2.	Meningkatnya layanan pegawai di Direktorat IK. Perekonomian dan Maritim	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan bidang kesekretariatan (keuangan, persuratan, kepegawaian, BMN, perencanaan program dan pelaporan) di direktorat IK Perekonomian dan Maritim	70	85	121

Tabel 18. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK Perekonomian dan Maritim Tahun 2021



#### 4. Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sesuai dengan Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor pendidikan, agama, kebudayaan, sosial, pemuda, olahraga, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, serta desa dan transmigrasi.

Direktorat IK PMK memiliki satuan target yang dirumuskan berdasarkan proyeksi capaian di bidang produksi konten dan diseminasi informasi yang disesuaikan dengan kriteria keberhasilan yang telah menjadi kesepakatan bersama di tingkat Eselon I. Secara umum capaian Direktorat IKPMK di tahun anggaran 2021 dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya Jangkauan Penyebaran Informasi dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase Masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah bidang PMK	70%	84%	120%
		Persentase Masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah bidang penanggulangan Stunting	70%	75%	107%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah bidang PMK melalui media elektronik	2.000.000	24.786.075	1.238%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang PMK melalui media cetak	500.000	752.949	150%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang PMK melalui media sosial	100.000	98.489	98%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang PMK melalui media online	2.500.000	2.741.995	109%

		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang PMK melalui media tatap muka dan pertunra	2.000	2.408	120%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah di bidang PMK melalui media luar ruang	7.000.000	10.411.563	148%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah tema penanggulangan Stunting melalui media elektronik	1.000.000	2.310.750	231%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah tema penanggulangan Stunting melalui media cetak	500.000	752.949	150%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah penanggulangan Stunting melalui media sosial	1.500.000	1.706.322	113%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah penanggulangan Stunting melalui media online	500.000	7.590.532	1.518%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan pemerintah penanggulangan Stunting melalui media tatap muka dan pertunra	2.000	3.134	156%
		Jumlah sebaran informasi publik program dan kebijakan penanggulangan Stunting media luar ruang	2.500.000	3.971.171	158%
		Persentase (%) Berita Hoaks yang berhasil diklarifikasi bidang PMK	65%	68%	105%
2.	Meningkatnya layanan pegawai di Direktorat IK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan bidang kesekretariatan (keuangan, persuratan, kepegawaian, BMN, perencanaan program dan pelaporan) di direktorat IK Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70	70	100%

Tabel 19. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat IK PMK Tahun 2021

### Capaian Khusus Penanggulangan Stunting

Seperti tingkat engagement di media sosial, pengguna media konvensional di Indonesia juga makin menurun di tahun 2020 (Pusparisa, 2021). Contohnya saja, berdasarkan data GlobalWebIndex, majalah mengalami kemerosotan jumlah pembaca dari 51.3% pada pertengahan 2019 menjadi 44.4% pada akhir tahun 2020.

Penyusutan jumlah pengguna media konvensional berbanding terbalik dengan durasi penggunaan media digital. Hal inilah yang menginisiasi Koran Tempo berhenti dicetak dan beralih sepenuhnya ke digital per tanggal 1 Januari 2021. Keputusan ini diambil karena perubahan perilaku pembaca surat kabar dalam beberapa tahun

belakangan (Nugraha, 2020). Dengan semakin maraknya penggunaan smartphone, perilaku pembaca pun beralih dari media cetak ke digital.

Untuk menyesuaikan pada tren tersebut, maka Direktorat IKPMK juga mengalihkan sebagian porsi target jumlah sebaran informasi melalui media cetak menjadi media online. Ini yang menjadi alasan mengapa capaian indikator “Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Penanggulangan Stunting Melalui Media Cetak” hanya 62.92% (314,922 orang) sementara capaian indikator “Jumlah Sebaran Informasi Publik Program dan Kebijakan Pemerintah Penanggulangan Stunting Melalui Media Online” mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 1,518% (7,590,532 views). Penyesuaian dilakukan karena dua kondisi. Pertama, tren target komunikasi yang banyak mengakses informasi melalui media sosial dan media online. Kedua, salah satu upaya untuk mencapai target indikator “Persentase Masyarakat yang Memahami Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Tema Penanggulangan Stunting” sebesar 70%.

#### **4. Direktorat Pengelolaan Media**

Dalam mendukung capaian kinerja eselon 1 Direktorat Pengelolaan Media (Direktorat PM) melakukan inovasi pola pendekatan diseminasi yang lebih efektif, efisien, dan masif sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo No 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, yaitu melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media online, cetak, audio visual, dan media sosial.

Secara umum capaian kinerja Direktorat PM tahun anggaran 2021 dapat tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya kualitas penyebaran informasi publik melalui media yang dikelola pemerintah	Persentase (%) masyarakat yang mengakses informasi program prioritas pemerintah melalui media pemerintah (own media)	60%	98%	
		Persentase (%) daerah 3T yang dapat mengakses program pemerintah melalui own media	40%	38%	
		Persentase (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program pemerintah melalui own media	70%		
		Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan bidang (keuangan, persuratan, kepegawaian, BMN, perencanaan program dan pelaporan) di direktorat Pengelolaan Media	70	70	

Tabel 20. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2021

## 5. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Setditjen IKP) merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Ditjen IKP Kemkominfo yang mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara kelembagaan, Setditjen IKP berperan penting dalam mendukung organisasi secara teknis dan administratif dalam hal administrasi keuangan, aset negara, kepegawaian, perencanaan, pengawasan kinerja, hukum dan kerjasama.

Dasar penetapan kinerja untuk Perjanjian Kinerja di Setditjen IKP ialah mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja eselon I di Ditjen IKP. Capaian Setditjen IKP mempunyai kontribusi langsung terhadap capaian kinerja dalam perjanjian kinerja eselon I yang menjadi amanat bagi Setditjen IKP berfokus pada dukungan manajerial serta pemantauan internal organisasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen IKP, berikut adalah capaian kinerja tahun anggaran 2021:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Optimalisasi komunikasi publik Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	Persentase (%) Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional	80%	80%	100%
		Penyebaran Informasi Tentang Kebijakan & Program Komunikasi Publik Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021	118.694 spot/kegiatan	132.987 spot/kegiatan	112%
	Optimalisasi dukungan komunikasi publik Kesiapan Indonesia Dalam Perhelatan Event (PON PEPARNAS) Dan Internasional (G-20 Indonesia Presidency 2022)	Penyebaran Informasi Tentang Kesiapan Indonesia Dalam Perhelatan Event (PON PEPARNAS) Dan Internasional (G-20 Indonesia Presidency 2022) di Tahun 2021	220 spot/kegiatan	287 spot/kegiatan	130%
	Dukungan Penyebaran Informasi Publik Kenegaraan Melalui PSO Bidang Pers	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten informasi publik kenegaraan melalui PSO Bidang Pers	60%	69%	116%
	Peningkatan kualitas Tata Kelola Ditjen IKP	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen IKP TAHUN 2021	78	84%	107%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen IKP TAHUN 2021.	68.5	69,5%	102%
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen IKP TAHUN 2021.	86	85,68%	99%
		Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen IKP Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK	1%	1%	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Itjen di Lingkungan Ditjen IKP	70%	100%	142%
		Nilai SPIP Ditjen IKP	3.35	30%	101%
		Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen IKP	3.71	3.80	102%
		Persentase (%) fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan Kerjasama bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%
		Survei Persepsi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen IKP	87,5	87.5	100%

Tabel 21. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen IKP Tahun 2021

## Capaian Khusus

### A. Reformasi Birokrasi

Simpulan hasil revidu penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun Anggaran 2021 di Ditjen IKP pada komponen pengungkit menunjukan nilai 21,58 (dua puluh satu koma lima puluh delapan) atau sebesar 91,82% (sembilan puluh satu koma delapan puluh dua persen) dari nilai maksimal komponen pengungkit sebesar 23,5 (dua puluh tiga koma lima). Nilai tersebut adalah penilaian komponen pengungkit dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai PMPRB
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,05
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,95
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,84
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,45
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,34
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>14,60</b>	<b>13,23</b>

Tabel 22. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen  
Komponen Pengungkit (Pemenuhan) 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai PMPRB
1.	Manajemen Perubahan	3,00	Masih diriviu
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	Masih diriviu
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	Masih diriviu
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	Masih diriviu
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	Masih diriviu
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	Masih diriviu
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	Masih diriviu
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	Masih diriviu
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>21,70</b>	<b>0,00</b>

Tabel 23. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Komponen  
Pengungkit (Reform) 2021

## **B. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen IKP**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, penilaian SPIP merupakan gabungan dari beberapa unsur yang, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pada tahun 2021, hasil penilaian SPIP di Ditjen IKP menunjukkan capaian pada tingkat level 3 atau “terdefinisi”. Tingkatan ini dapat diartikan bahwa karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum telah mampu menerapkan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

Capaian tingkat implementasi pada level 3 merupakan ambang dari target nilai secara nasional yang ditetapkan pada Rencana RPJMN 2020–2024. Artinya secara kinerja Ditjen IKP sudah mampu memenuhi capaian yang telah ditetapkan dalam target capaian secara nasional. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung terhadap pencapaian ini secara umum adalah berjalannya sistem pengawasan terkait aspek pengendalian disetiap unsur satuan kerja.



No	Fokus Penilaian	Tingkat Maturitas (0 s.d 5)	Bobot	Skor
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	3,75%	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3,75%	0,113
3	Kepemimpinan yang kondusif	3	3,75%	0,113
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	3,75%	0,150
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	3,75%	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3,75%	0,113
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3	3,75%	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	4	3,75%	0,113
9	Identifikasi Risiko	3	10,00%	0,300
10	Analisis Risiko	3	10,00	0,300
11	Reviu Kinerja	3	2,27%	0,068
12	Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	2,27%	0,068
13	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	2,27%	0,068
14	Pengendalian Fisik atas Aset	3	2,27%	0,068
15	Penetapan dan Reviu Indikator	3	2,27%	0,068
16	Pemisahan Fungsi	3	2,27%	0,068
17	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	2,27%	0,068
18	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	3	2,27%	0,068

19	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	2,27%	0,068
20	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	2,27%	0,068
21	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Interen (SPI) serta transaksi dan Kejadian Penting	2	2,27%	0,045
22	Informasi	3	5,00%	0,150
23	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	3	5,00%	0,150
24	Pemantauan Berkelanjutan	3	7,50%	0,225
25	Evaluasi Terpisah	3	7,50%	0,225
	<b>Jumlah Skor</b>	<b>3,052</b>		
	<b>Tingkat Maturitas</b>	<b>TERDEFINISI</b>		

Tabel 24. Matriks Penilaian SPIP oleh  
Inspektorat Jenderal Kemkominfo Tahun 2021



# BAB IV

PENUTUP

## A. Kesimpulan

Hasil pencapaian lingkup Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkup Eselon I Ditjen IKP sebagian besar telah memenuhi bobot 100%. Pencapaian di lingkup Eselon I tersebut mendukung (berkorelasi) terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kementerian (IKK) Kemkominfo. Kondisi itu menandakan bahwa capaian kinerja di lingkungan Ditjen IKP secara umum sudah memenuhi target yang direncanakan.

No	Indikator Kinerja Sasaran Program Eselon I	Target 2021	Capaian Kinerja	Presentase Capaian
1	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	72%	80,4%	100
2	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.	72%	76,8%	100



No	Indikator Kinerja Sasaran Program Kementerian	Target 2021	Capaian Kinerja	Presentase Capaian
1	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	72%	75.5%	100

Tabel 25. Korelasi IKP Ditjen IKP terhadap IKK Kemkominfo

## B. Rekomendasi

1. Berdasarkan hasil survei persepsi, terdapat pergeseran dalam cara masyarakat mengakses informasi. Masyarakat cenderung menggunakan smartphone daripada media konvensional lainnya (tv, radio, koran dsb). Masyarakat mengakses informasi melalui media interpersonal seperti sosial media dan aplikasi percakapan. Meskipun masyarakat masih mengakui media televisi sebagai sumber informasi yang utama. Hal tersebut bisa dijadikan rujukan dalam penyusunan strategi komunikasi kedepannya;
2. Pada tahun 2021, tingkat awareness masyarakat terhadap informasi seputar vaksinasi COVID-19 lebih tinggi daripada informasi-informasi program prioritas lainnya karena fokus diseminasi masih pada penanganan pandemi. Pada tahun berikutnya perlu ditingkatkan fokus komunikasi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) apabila pandemi telah dapat dikontrol;
3. Untuk diseminasi informasi dengan output aksi masyarakat (contoh:penerapan protokol Kesehatan dan vaksinasi) dapat menggunakan media komunikasi interpersonal seperti tenaga medis, penyuluh kesehatan atau petugas posyandu ditingkat RT/RW yang dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat baik melalui tatap muka maupun melalui media sosial dalam tempo waktu tertentu dengan mengelaborasi dengan isu-isu praktis di masing-masing daerah;
4. Dengan tidak tercapainya target indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) di tingkat nasional, diperlukan mapping permasalahan kendala apa saja yang ditemui oleh pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi, advokasi dan pendampingan perlu dilaksanakan terutama pada daerah-daerah yang capaian indeks PIKP-nya masih rendah.

# REFERENSI

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Undang-Undang No.14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021. Renstra Kemkominfo Tahun 2020—2024.

Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional Pada Masyarakat Tahun 2021 – Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik: <https://komin.fo/EZssK>.

Survei Efektivitas Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Tahun 2021 -Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik: <https://komin.fo/KcONm>.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2021 – Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

Survei Pembaca Owned Media Direktorat Pengelolaan Media Tahun 2021- Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik: <https://komin.fo/9bmeZ>.

### Lampiran Realisasi Anggaran Tahun 2021:

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Direktorat Tata Kelola dan Kemitraaan Komunikasi Publik	19.669.638.000	18.214.044.803	92,60
2	Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan	39.462.621.000	38.320.300.348	98,65
3	Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	64.212.710.000	63.706.233.530	99,12
4	Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	58.779.396.000	57.762.978.973	98,27
5	Direktorat Pengelolaan Media	74.382.274.000	73.977.866.471	99,46
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	552.414.459.000	544.953.368.641	97,11
7	Monumen Pers Nasional Surakarta	11.425.198.000	10.610.061.821	92,87
8	Museum Penerangan TMII	13.065.370.000	12.185.447.216	93,27
JUMLAH		833.411.666.000	819.730.301.803	98,36

Sumber : Aplikasi OM SPAN





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

DIREKTORAT JENDERAL  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK